

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah tentang *good corporate governance* sudah terjadi sejak adanya krisis finansial di berbagai negara pada tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand, Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura. Krisis finansial di beberapa negara tersebutlah yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia yang dipandang oleh beberapa para ahli sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Contoh dari lemahnya praktek *good corporate governance* tersebut antara lain minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan komisaris independen, serta kurangnya kontribusi pihak eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *good corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Seperti kasus yang terjadi di Indonesia, pada PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Terjadinya krisis tahun 1997 di Indonesia juga berdampak pula pada salah satu sektor penyangga ekonomi yaitu perbankan, yang mengakibatkan krisis terparah dalam sejarah perbankan Indonesia. Sehingga pemerintah pada Maret 1999 mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penutupan bank,

pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank (Sari, 2010). Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dibentuk bertujuan untuk membentuk sistem perbankan nasional yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalam API tersebut terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *good corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Keseriusan terhadap isu *good corporate governance* tidak hanya dituangkan dalam bentuk API saja, terbukti dengan dikeluarkannya paket kebijakan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Penerapan *good corporate governance* yang telah dituangkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI 2006 ini diharapkan dapat mengembalikan nama baik perusahaan perbankan yang sempat terpuruk, menciptakan sistem perbankan yang

sehat dan juga melindungi kepentingan para *stakeholder*. Selain itu penerapan *good corporate governance* diharapkan juga dapat berpengaruh pada membaiknya kinerja perbankan. Sehingga dengan membaiknya kinerja perbankan dapat juga meningkatkan nilai perusahaan perbankan.

Nilai perusahaan adalah harga sebuah saham yang telah beredar dipasar saham yang harus dibayar oleh investor untuk dapat memiliki sebuah perusahaan *go public*. Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan akan berdampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang baik dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan harus terjadi hubungan kerjasama yang selaras antara manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi *shareholder* maupun *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan memaksimalkan modal kerja yang dimiliki. Dalam kenyataannya penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah. Masalah tersebut biasanya terjadi antara manajer dan pemegang saham yang biasa disebut masalah agensi (*agency problem*). Adanya *agency problem* tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk itu diperlukan sebuah kontrol dari pihak luar dengan cara

melakukan pengawasan aktivitas perusahaan. Pengawasan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pengendalian manajemen suatu perusahaan. Mengawasi merupakan suatu tindakan mengamati dan melihat suatu tindakan agar tindakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Diharapkan bahwa *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan (Laila, 2011)

Unsur-unsur GCG yang digunakan pada penelitian ini yaitu, proporsi kepemilikan manajerial, proporsi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit. Kepemilikan manajerial yaitu persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan yang memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan termasuk direksi dan komisaris atau seluruh modal dalam perusahaan (Syafitri, 2018). Selain adanya kepemilikan manajerial yang berfungsi sebagai penyataraan kepemilikan saham antara manajer dan pemegang saham, perusahaan juga memiliki kepemilikan Institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi keuangan yang bentuknya berupa saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak institusi seperti, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Putra.R.H dan Fidiana, 2017).

Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris lain harus bekerja secara profesional, saat dewan komisaris independen bekerja secara profesional maka, hasil keputusan yang diperoleh akan bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun (Putra.R.H dan Fidiana, 2017).

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris independen dibantu oleh komite audit. Adanya komite audit dapat menambah efisiensi dari pengawasan laporan keuangan yang telah disajikan didalam perusahaan dan peluang timbulnya asimetri informasi sangat kecil kemudian, hal tersebut akan akan memiliki dampak terhadap kenaikan kinerja keuangan (Azis & Hartono, 2017).

Dalam Penelitian terdahulu ditemukan bahwa ada ketidaksamaan dalam berbagai hasil penelitian. Hasil penelitian (Sujoko & Soebiantoro, 2018)menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Sofyaningsih & Hardiningsih, 2016)menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Horváth & Spirollari, 2012)menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Veronica & Wardoyo, 2013)menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah di atas bahwa penulis ingin menggunakan *price book value*(PBV) untuk mengukur nilai perusahaan, perbedaan selanjutnya terletak pada obyek penelitian yaitu penulis ingin meneliti perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perbedaan terakhir terletak pada periode penelitian yaitu pada tahun 2017-2020.

Dengan menggunakan periode penelitian tersebut hasil penelitian lebih mencerminkan keadaan terkini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar dalam di Bursa Efek Indonesia//IDX (*Indonesia Stocks Exchange*)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini bisa diharapkan akan memberikan manfaat manfaat yang dapat mendukung kontribusi untuk studi

1. Bagi Manajemen, diharapkan dapat memberikan manfaat penerapan *good corporate governance* dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.
2. Bagi Peneliti, diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama melakukan penelitian tentang *good corporate governance*.
3. Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan *good corporate governance*.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan dalam melanjutkan penelitian terkait dengan analisis pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.
5. Bagi investor, calon investor, dan badan otoritas pasar modal, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai relevansi dari *good corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan dengan nilai perusahaan. Serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan dalam memilih perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan deskripsi obyek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil serta penjelasan terkait argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN